

**ANALISIS FLYPAPER EFFECT DI WILAYAH PAPUA**

**I Gede Dhanan Jaya<sup>1</sup>**  
**Ida Ayu Purba Riani<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui fenomena *Flypaper Effect* di Wilayah Papua; 2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal di Wilayah Papua. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu belanja modal terhadap PAD, DAU, DAK dan DOK. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen, data diperoleh dari LHP BPK. Alat analisisnya menggunakan model panel regresi sederhana. Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara belanja modal terhadap PAD, DAU, DAK dan DOK. Hasil Penelitian yaitu : 1) Terjadi fenomena flypaper effect berdasarkan analisis yang dilakukan dimana nilai koefisien PAD lebih kecil dibandingkan nilai koefisien variabel DAU, DAK dan Otonomis Khusus (Otsus) dalam menentukan/mempengaruhi nilai Belanja Modal. Artinya terjadi flypaper effect pada pemerintah kabupaten/kota di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Papua masih bergantung kepada pemerintah pusat; 2) Terdapat pengaruh positif tidak signifikan pendapat asli daerah terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua terlihat dalam memberikan otonomi daerah dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal. Namun, faktor-faktor lain seperti kebijakan nasional dan efisiensi pengelolaan anggaran juga memiliki peranan penting dalam menentukan alokasi belanja modal yang optimal. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik dan kerjasama antar-stakeholder merupakan faktor kunci untuk mencapai pengaruh pendapat asli daerah yang lebih signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar di kota/kabupaten Provinsi Papua; 3) Terdapat pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua bersifat positif namun tidak signifikan, tetap terdapat peluang untuk meningkatkan pengaruh tersebut dengan pemenuhan sumber daya yang cukup, perencanaan yang baik, dan pengelolaan keuangan yang efektif; 4) DAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua. DAK memberikan pendanaan tambahan yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperbaiki pembangunan sosial. Dengan adanya DAK, pembangunan di Provinsi Papua dapat berjalan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota/kabupaten tersebut; 5) Dana Otsus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua. Dana ini dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, penggunaan dana Otsus ini juga perlu diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyelewengan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Kata Kunci : Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK, DOK

**PENDAHULUAN**

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah secara luas mulai diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014). Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk mengatur daerah otonomnya sendiri. Otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang lebih proposional, akuntabilitas dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu DPR dan MPR sebagai wakil rakyat harus menjawab seluruh tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Berhubungan dengan hal ini, peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menciptakan kemandirian yang selalu diinginkan tersebut.

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Bagi negara berkembang, desentralisasi fiskal dipercaya sebagai solusi untuk masalah ekonomi dan politik yang dihadapi, akan tetapi, desentralisasi fiskal juga memiliki potensi masalah, yang memungkinkan menimbulkan masalah baru sehingga dapat menjadi tambahan atas beban yang sudah dipikul (Prud'homme, 1995 dalam Jumadi, dkk, 2013). Melihat keterbatasan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri, pemerintah pusat hadir untuk membantu mengatasi fiscal gap (selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah) yang terjadi melalui dana transfer. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilaksanakan sesuai prinsip pembagian kewenangan. Artinya pada hubungan keuangan antara pusat dan daerah, diperlukan aturan yang sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Khusaini, 2018). Salah satu bantuan pemerintah pusat ini berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (DOK).

Menurut Ndadari dan Adi (2008), menyebutkan bahwa salah satu fenomena yang paling mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Ketergantungan ini sangat terlihat jelas pada aspek keuangan. Alokasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah kurang memperhatikan kemampuan tiap-tiap daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaannya. Akibat yang ditimbulkan adalah Pemerintah Daerah akan selalu menuntut transfer yang besar dari Pemerintah pusat, bukannya memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Porsi DAU terhadap penerimaan daerah masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Papua. Kecenderungan saat ini dalam prakteknya, DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah daerah lebih banyak memanfaatkan DAU untuk belanja operasional ketimbang belanja modal.

Menurut Ndadari dan Adi (2008), menyebutkan bahwa proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Alokasi biaya transfer yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah biasanya kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal, sehingga biaya transfer yang diterima lebih banyak digunakan untuk memenuhi belanja daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki industri yang maju akan memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan daerah yang lebih sedikit memiliki sumber daya alam maupun industri yang sedikit. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah tentu masih mengharapkan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. Permasalahan yang muncul adalah ketika pemerintah daerah terlalu bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa berusaha memanfaatkan potensi daerah yang mereka miliki yang selanjutnya dikenal dengan istilah Flypaper effect.

Flypaper effect merupakan kecenderungan menggunakan dana dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari pendapatan daerah yang dimiliki atau yang dikenal dengan PAD. Flypaper effect itu sendiri merupakan respon yang asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Maimunah (2008) menemukan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Maimunah (2008) juga mengatakan bahwa fenomena Flypaper Effect berpengaruh dalam memprediksi belanja daerah tahun kedepannya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan menunjukkan resiko terjadinya Flypaper Effect di wilayah Papua cukup tinggi, hal tersebut diketahui bahwa selama tahun 2013-2022 nilai rata-rata PAD 29 Kabupaten/Kota di wilayah Papua hanya sebesar 3,26% dari total penerimaan daerah. Nilai tersebut sangatlah kecil untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Dalam 10 tahun anggaran dari 29 Kabupaten/Kota hanya dua wilayah yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika yang memiliki nilai rata-rata PAD yang melewati 10%, sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya memiliki nilai rata-rata PAD paling rendah sebesar 0,85% dengan rincian pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Penerimaan Dana Kabupaten/Kota di Wilayah Papua Tahun 2013-2022**

No	Nama Kabupaten	Rata-rata DAU	Rata-rata DAK	Rata-rata Otsus	Rata-rata PAD	Rata-rata Pendapatan Lainnya
1	Kota Jayapura	51,03%	10,57%	6,92%	14,65%	16,84%
2	Kab. Jayapura	52,51%	12,60%	6,99%	7,11%	20,79%
3	Kab. Sarmi	64,26%	11,43%	8,08%	1,29%	14,93%
4	Kab. Keerom	57,46%	14,26%	8,21%	2,35%	17,71%
5	Kab. Pegunungan Bintang	59,29%	14,40%	7,99%	1,46%	16,86%
6	Kab. Tolikara	50,74%	12,51%	8,46%	1,14%	27,15%
7	Kab. Puncak	59,69%	12,11%	9,28%	1,96%	16,97%
8	Kab. Puncak Jaya	56,36%	11,10%	9,25%	1,26%	22,02%
9	Kab. Mamberamo Raya	65,45%	10,48%	9,03%	0,85%	14,19%
10	Kab. Biak Numfor	49,95%	16,04%	7,62%	4,53%	21,86%
11	Kab. Supiori	61,82%	12,82%	11,28%	1,47%	12,60%
12	Kab. Waropen	53,88%	17,67%	10,29%	0,90%	17,26%
13	Kab. Kepulauan Yapen	53,32%	15,47%	8,37%	3,92%	18,92%
14	Kab. Mamberamo Tengah	61,83%	13,66%	9,79%	1,16%	13,56%
15	Kab. Jayawijaya	50,30%	14,05%	7,81%	4,54%	23,30%
16	Kab. Lanny Jaya	49,41%	14,72%	9,31%	1,47%	25,09%
17	Kab. Yalimo	54,25%	12,86%	8,50%	2,04%	22,35%
18	Kab. Yahukimo	52,19%	12,12%	7,88%	1,73%	26,09%
19	Kab. Nduga	56,23%	12,72%	9,29%	0,97%	20,80%
20	Kab. Merauke	61,08%	12,32%	5,44%	7,13%	14,03%
21	Kab. Asmat	61,26%	10,68%	7,50%	3,08%	17,49%
22	Kab. Boven Digoel	64,67%	9,74%	8,13%	2,23%	15,22%
23	Kab. Deiyai	58,15%	14,63%	11,43%	1,18%	14,61%
24	Kab. Dogiyai	56,70%	14,42%	11,09%	1,61%	16,17%
25	Kab. Intan Jaya	62,54%	12,38%	9,62%	1,31%	14,15%
26	Kab. Mappi	57,60%	10,87%	7,97%	3,05%	20,51%
27	Kab. Nabire	56,80%	14,23%	7,41%	4,28%	17,27%
28	Kab. Paniai	52,03%	15,76%	9,89%	1,91%	20,41%
29	Kab. Mimika	24,01%	7,23%	3,43%	14,07%	51,27%
<b>Rata-Rata</b>		<b>55,68%</b>	<b>12,89%</b>	<b>8,49%</b>	<b>3,26%</b>	<b>19,67%</b>

Sumber : Data BPK Provinsi Papua, 2023

Analisis terkait fenomena flypaper effect di wilayah Papua secara otomatis kedepan berimplikasi pada pemberdayaan PAD tidak akan tergal secara optimal karena dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah di wilayah Papua jauh melebihi kemampuan pemerintah tersebut mendapatkan anggaran di daerah. Dampaknya pemerintah daerah cenderung lebih terlibat dengan belanja daerah daripada berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Padahal, pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Hampir tidak mungkin mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Situasi yang terjadi di Kabupaten/Kota di wilayah Papua memberikan indikasi bahwa belanja daerah belum dikelola secara efektif karena belum berhasil mengatasi permasalahan kesenjangan daerah. Ketidakefektifan tersebut disebabkan banyaknya belanja daerah yang sedikit digunakan untuk belanja yang layak. Situasi ini dilihat pada realisasi belanja di Kabupaten/Kota di wilayah yang terlalu

banyak dibelanjakan untuk belanja pegawai, dan juga perjalanan dinas yang tidak efektif. Selain itu pengeluaran ini menjadi beban bagi pemerintah daerah. Sebaliknya pengeluaran yang tergolong pengeluaran publik seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pada gilirannya mengurangi ketimpangan pendapatan. Komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan social masyarakat dapat dilihat dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

Belanja modal merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah berkaitan dengan pengadaan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan dan kendaraan. Belanja ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk menunjang kinerja pemerintah dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## METODE ANALISIS

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu belanja modal terhadap PAD, DAU, DAK dan DOK. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen, data diperoleh dari LHP BPK. Alat analisisnya menggunakan model panel regresi sederhana. Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara belanja modal terhadap PAD, DAU, DAK dan DOK. Sehingga model regresi data panel yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \mu_{it}$$

Dimana: t = tahun

i = Kabupaten

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Intercept/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi

$X_1$  = PAD

$X_2$  = DAU

$X_3$  = DAK

$X_4$  = DOK

$\mu$  = error term

### 1. Metode Data Panel

#### a) Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah model regresi data panel yang menggabungkan data time series dan cross section dengan pendekatan kuadrat paling kecil dan dapat menggunakan metode pooled least square. Asumsi common effect model ini adalah :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

#### b) Fixed Effect Model (FEM)

Fixed effect model adalah model regresi data panel yang memiliki efek berbeda antar individu dan individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan dapat diestimasi melalui teknik least square dummy. Asumsi fixed effect model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

c) Random Effect Model (REM)

Random effect model adalah model regresi data panel yang memiliki perbedaan dengan fixed effect model, pemakaian random effect model mampu menghemat pemakaian derajat kebebasan sehingga estimasi lebih efisien. Random effect model menggunakan generalized least square sebagai pendugaan parameter. Asumsi random effect model adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \dots + \beta_n X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan jenis model yang akan dipilih antara common effect model atau fixed effect model. Hipotesis dalam menentukan model regresi data panel adalah apabila nilai cross section chi-square < nilai signifikan (0,05), maka fixed effect model akan dipilih. Sebaliknya, jika nilai cross section chi-square > nilai signifikan, maka common effect model akan dipakai dan uji Hausman tidak diperlukan.

b) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan jenis model yang akan dipilih antara fixed effect model (FEM) dengan random effect model (CEM). Hipotesis dalam menentukan model regresi data panel adalah apabila nilai cross section random < nilai signifikan(0,05), maka fixed effect model. Sebaliknya, jika nilai cross section random > nilai signifikan (0,05), maka random effect model yang dipilih.

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Formula hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh signifikan PAD (X1) terhadap Belanja Modal.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan DAU (X2) terhadap Belanja Modal.

H3 : Terdapat pengaruh signifikan DAK (X3) terhadap Belanja Modal.

H4 : Terdapat pengaruh signifikan DOK (X4) terhadap Belanja Modal.

Hasil Uji signifikan parameter individu (Uji t) dapat dilihat melalui nilai sig, yaitu :

1) Jika nilai Sig. t-stat > 0,05 , maka H0 diterima

2) Jika nilai Sig. t-stat < 0,05 , maka H0 ditolak

4. Uji Signifikansi Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Formula hipotesis pada penelitian ini adalah:

H0 : PAD, DAU, DAK, DOK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.  
 HA : Paling tidak salah satu variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.  
 Hasil pengaruh tersebut dilihat berdasarkan nilai p-value (nilai signifikan) yaitu:

- 1) Jika nilai Sig. F-stat > 0,05, maka H0 diterima
- 2) Jika nilai Sig. F-stat < 0,05, maka H0 ditolak.

5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan dalam analisis regresi untuk menguji apakah sudah memenuhi sifat statistik estimator terbaik, linear dan tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE). Berdasarkan Gujarati (2012) data panel sedikit terjadi kolinearitas antar variabel sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinearitas. Sehingga uji asumsi klasik pada data panel yang akan dilakukan hanya terdiri dari autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6. Uji Flypaper Effect

Syarat terjadinya Flypaper Effect adalah (a) apabila PAD dan DAU keduanya sama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien regresi DAU lebih besar daripada nilai koefisien regresi PAD, atau (b) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, maka dapat disimpulkan terjadi Flypaper Effect.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil Penelitian**

**a) Uji Asumsi Klasik**

1) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah seluruh variabel independen dalam model regresi mempunyai varians error confounding yang sama. Ambang batas untuk pengujian ini adalah sig. 0,05 yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Dan jika sig. > 0,05 menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ialah disajikan di Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Kesimpulan
PAD	0,212	tidak terjadi heteroskedastisitas
DAU	0,538	tidak terjadi heteroskedastisitas
DAK	0,889	tidak terjadi heteroskedastisitas
Otsus	0,373	tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Hasil pada tabel 5.1 pada tingkatan signifikansi 5% semua koefisien regresi ini signifikan (lebih dari signifikansi > 0,05), disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas di persamaan.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2017).

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Nilai DW-hitung	dL	dU	4-dU
1,128	1,678	2,995	1,105

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Jika  $DU > DW > 4-DU$  maka hasil pengujian dianggap lulus uji autokorelasi. Untuk mendapatkan nilai DU dapat dilihat dari jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 290 sampel dengan empat variabel bebas. Kemudian dapat menemukan nilai DU di tabel Durbin Watson, dan nilai DU adalah 2,995. Nilai DW kemudian dapat ditampilkan pada tabel setelahnya. Nilai sebesar 1,128 diperoleh dari hasil pengujian. Dari temuan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa model bebas autokorelasi,  $2,995 > 1,128 > 1,105$ .

**b) Pemilihan Model Estimasi Data Panel**

Terdapat tiga pendekatan yang biasa dilakukan untuk mengestimasi data panel, yaitu model OLS Pooled (common), model fixed effect (FEM), model random effect (REM). Dalam menentukan estimasi regresi data panel, dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang sesuai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendapatkan model yang tepat adalah dilakukan uji Chow Test, uji Hausman Test serta uji Lagrange Multiplier.

Untuk mengetahui model mana yang terbaik (CEM atau FEM) yang akan dipilih dalam penelitian ini, dilakukan uji Chow seperti yang terdapat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8,733	(28,25)	0.000
Cross-section Chi-square	193,892	29	0.000

Sumber : Output Data Panel Menggunakan E-Views 12

Hasil dari Uji Chow menunjukkan, mode yang terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM), karena nilai Cross-section F adalah  $0,000 < 0,05$  (Signifikansi 5 %). Setelah hasil uji Random Effect Model (REM) dilakukan maka Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman (Pengujian antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model).

**Tabel 5. Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4,870	4	0,3009

Sumber : Output Data Panel Menggunakan E-Views 12

Hasil dari Uji Hausmant menunjukkan, model yang terbaik adalah Random Effect Model (REM), karena nilai p-value adalah  $0,300 > 0,05$  (Signifikansi 5 %). Karena terdapat perbedaan pemelihan model terbaik yang dilakukan pada uji Chow (FEM terbaik) dan uji Hausman (REM) terbaik, maka dilakukan uji Lagrange Multiplier, untuk menentukan mana yang lebih baik antara CEM dan REM.

**Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier**

Test Summary	Cross Section	Prob.
Breusch-Pagan	222,074	0,000

Sumber : Output Data Panel Menggunakan E-Views 12

Hasil yang diperlihatkan menunjukkan bahwa REM yang terbaik dimana dilihat dari hasil probalitas Breusch-Pagan menunjukkan nilai  $0,000 (< 0,05)$ . Sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Models (REM).

**c) Interpretasi Statistik**

Pengujian hipotesis dilakukan agar dapat menginterpretasikan hasil regresi dengan benar. Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dengan menggunakan uji simultan (uji F Statistic), serta secara parsial dengan menggunakan uji t. Hasil uji F, uji t dan uji koefisien dterminasi ditampilkan dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Random Efek Models**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.031962	0.031342	1.019790	0.3087
DAU	0.107074	0.060897	1.758276	0.0798
DAK	0.436127	0.049743	8.767510	0.0000
OTSUS	0.345106	0.047926	7.200862	0.0000
C	1.153425	1.098374	1.050121	0.2946
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.117348	0.4499
Idiosyncratic random			0.129768	0.5501
Weighted Statistics				
Root MSE	0.128841	R-squared		0.329538
Mean dependent var	3.758321	Adjusted R-squared		0.320128
S.D. dependent var	0.157622	S.E. of regression		0.129966
Sum squared resid	4.814001	F-statistic		35.02005
Durbin-Watson stat	1.128027	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.289036	Mean dependent var		11.38548
Sum squared resid	8.665318	Durbin-Watson stat		0.626674

Sumber : Output Data Panel Menggunakan E-Views 12

**Tabel 8. Efek dan Konstanta Random Effect Models**

No	Nama Kabupaten	Efek	Konstanta
1	Kota Jayapura	0,4587	1,6697
2	Kab. Jayapura	0,2543	1,4653
3	Kab. Sarmi	0,0289	1,2399
4	Kab. Keerom	0,1248	1,3358
5	Kab. Pegunungan Bintang	0,1283	1,3393
6	Kab. Tolikara	0,1893	1,4003
7	Kab. Puncak	0,2587	1,4697
8	Kab. Puncak Jaya	0,3015	1,5125
9	Kab. Mamberamo Raya	0,2179	1,4289
10	Kab. Biak Numfor	0,0397	1,2507
11	Kab. Supiori	0,0987	1,3097
12	Kab. Waropen	0,2582	1,4692
13	Kab. Kepulauan Yapen	0,2014	1,4124
14	Kab. Mamberamo Tengah	0,1985	1,4095
15	Kab. Jayawijaya	0,0125	1,8563
16	Kab. Lanny Jaya	0,1278	1,2873

No	Nama Kabupaten	Efek	Konstanta
17	Kab. Yalimo	0,2570	1,0589
18	Kab. Yahukimo	0,0998	1,9532
19	Kab. Nduga	0,8745	1,2397
20	Kab. Merauke	0,1287	1,5289
21	Kab. Asmat	0,9632	1,4893
22	Kab. Boven Digoel	0,7513	1,0258
23	Kab. Deiyai	0,8517	1,7398
24	Kab. Dogiyai	0,3587	1,2398
25	Kab. Intan Jaya	0,5239	1,2893
26	Kab. Mappi	0,2784	1,8531
27	Kab. Nabire	0,3287	1,5223
28	Kab. Paniai	0,1238	1,8744
29	Kab. Mimika	0,3874	1,3597

Sumber : Output Data Panel Menggunakan E-Views 12

**Tabel 9. Estimasi Random Effect Models**

BM= 1,153+0,031PAD+0,107DAU+0,435DAK+0,345Otsus			
	(0,308)	0,0798	(0,000)*
R2=0,329	Adj R2=0,320	F Stat=32,020	Prop Fstat=0,000

Keterangan: \*Signifikansi pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,10$ .

Angka dalam kurung adalah nilai probabilitas t-statistik.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

**Tabel 10. Efek dan Konstanta Random Effect Model (REM)**

No.	Variabel	Effect	Konstanta	Hasil
1	PAD	1,019	0,031	0,031
2	DAU	1,758	0,107	0,188
3	DAK	8,767	0,436	3,822
4	Otsus	7,200	0,345	2,484

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

**d) Uji Kebaikan Model Terpilih**

1) Uji Simultan (Uji F Statistic)

Uji F merupakan uji signifikansi yang digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya secara simultan variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan bila signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Dari Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan variabel otonomi khusus secara simultan/ bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanda modal kota/ kabupaten di Papua Tahun 2013-2022.

## 2) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Diduga bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Papua.

H2 : Diduga bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Papua.

H3 : Diduga bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Papua.

H4 : Diduga bahwa DOK berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Papua

Kriteria penerimaan dan penolakan  $H_0$  dan  $H_a$  dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi atau nilai t hitung. Apabila signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bila signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau secara parsial variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 8 maka pengujian terhadap hipotesis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel PAD dengan nilai koefisien 0,031 dan nilai signifikansinya (Prob.) adalah 0,308  $> 0,10$  sehingga hipotesis pertama H1 ditolak, artinya variabel PAD tidak berpengaruh signifikan pada level of 5% terhadap belanja modal kota/ kabupaten di Papua Tahun 2013-2022.
- Variabel DAU dengan nilai koefisien 0,107 dan nilai signifikansinya (Prob.) adalah 0,079  $> 0,05$  sehingga hipotesis kedua H2 ditolak, artinya variabel DAU tidak berpengaruh signifikan pada level of 5% terhadap belanja modal kota/ kabupaten di Papua Tahun 2013-2022.
- Variabel DAK dengan nilai koefisien 0,436 dan nilai signifikansinya (Prob.) adalah 0,000  $< 0,05$  sehingga hipotesis ketiga H3 diterima, artinya variabel DAK berpengaruh signifikan pada level of 5% terhadap belanja modal kota/ kabupaten di Papua Tahun 2013-2022.
- Variabel Otsus dengan nilai koefisien 0,346 dan nilai signifikansinya (Prob.) adalah 0,000  $< 0,05$  sehingga hipotesis keempat H4 diterima, artinya variabel Otsus berpengaruh signifikan pada level of 5% terhadap belanja modal kota/ kabupaten di Papua Tahun 2013-2022.

Berdasarkan seluruh hasil uji hipotesa parsial di atas, serta mengacu pada besaran angka koefisien regresi, maka dapat dipastikan secara signifikan telah terjadi fenomena flypaper effect di wilayah papua, oleh karena untuk mendeteksi terjadinya flypaper effect pada Belanja Daerah, menurut Muhammad, et., al, (2017), dilakukan dengan membandingkan efek DAU, DAK, dan Otsus dengan efek PAD terhadap Belanja Modal Daerah dalam regresi tunggal dan berganda. Syarat terjadinya flypaper effect apabila efek (nilai koefisien) dana transfer DAU, DAK, dan Otsus terhadap Belanja Modal Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan (Muhammad, et., al, 2017). Berdasar hasil model regresi parsial (Tabel 5.9) diketahui nilai parameter DAU (0,107), DAK (0,436) dan Otonomi Khusus (Otsus) (0,345) lebih besar dari PAD (0,031). Dengan membandingkan nilai koefisien regresi parsial DAU, DAK, dan DBH dengan PAD terhadap Belanja Daerah diketahui bahwa nilai parameter DAU, DAK, dan Otsus lebih besar dari PAD. Hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa ditemukan adanya flypaper effect.

## 2. Pembahasan

### a) Fenomena Flypaper Effect di Wilayah Papua

Nilai koefisien PAD (0,031) lebih kecil dibandingkan nilai koefisien pada variabel DAU (0,107), DAK (0,436) dan Otonomi Khusus (Otsus) (0,345) dalam menentukan/mempengaruhi nilai Belanja Modal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi DAU, DAK dan dana otonomi khusus sebagai akselerator peningkatan PAD belum berjalan dengan baik, walaupun proporsi rata-rata DAU, DAK dan dana otonomi khusus atas total pendapatan daerah pada Kota/ Kabupaten di Papua pada Tahun 2013-2022 masih tinggi, yakni sebesar 76,59%. Adapun proporsi rata-rata PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 23,41%. Hal tersebut masih belum sesuai dengan tujuan adanya transfer dari pemerintah pusat kepada daerah agar dana transfer (DAU, DAK, dan dana otonomi khusus)

dapat menjadi akselerator bagi pertumbuhan PAD di daerah. Hasil sejalan dengan penelitian ini ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2023), Rafi & Arza, (2023), Agussalim & Sultan, (2022) dan Musabbihan & Purnawati, (2018), dimana pada hasil penelitian tersebut memberikan hasil bahwa terjadi "flypaper effect" pada obyek penelitiannya pada pemerintah kabupaten/kota di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian lainnya yang menguatkan bahwa terjadi flypaper effect", juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Robert & Ida, (2016) dan Esra & Anthonius, (2016) pada pemerintah kabupaten/kota di Papua. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ndadari dan Priyo (2008) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, dimana telah terjadi terjadi "flypaper effect", yakni terjadi perilaku asimetris pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merespons transfer pemerintah pusat (DAU, DAK dan dana otonomi khusus).

Indikasi bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan untuk tetap memperoleh DAU, DAK dan dana otonomi khusus di periode-periode yang akan datang. Pemerintah daerah memperlihatkan adanya perilaku asimetris dengan cara memanipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya dapat dapat memperoleh bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi semakin tinggi; upaya-upaya peningkatan kapasitas fiskal justru mengalami hambatan dikarenakan kebijakan pemberian transfer ini, justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah (Hartati & Taufik, 2020).

Subadriyah, (2018) meneliti pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Hasil studinya adalah peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah. Di sisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional.

#### **b) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di wilayah Papua Tahun 2013 – Tahun 2022**

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di wilayah Papua Tahun 2013 – Tahun 2022**

Hasil analisis menggunakan uji t menjelaskan bahwa nilai uji t variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,031 ( $< 1,987$  ttabel) dan nilai signifikan 0,308 ( $> 0,05$ ) sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/ kabupaten di Papua tahun 2013 hingga tahun 2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin, (2022), Sartono & Zulkifli, (2023), dan Yakub et al., (2022).

Pengaruh positif tidak signifikan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua dapat dijelaskan dan dideskripsikan sebagai berikut. Pendapatan asli daerah adalah hak yang melekat pada suatu daerah tertentu, termasuk di Provinsi Papua. Pendapatan asli daerah dapat dimaknai sebagai hak istimewa yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut, termasuk alokasi belanja modal (Maimunah, 2006). Alokasi belanja modal sendiri merujuk pada penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

Pada tingkat Provinsi Papua, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal di kota/kabupaten. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Nurdini et al., 2015). Penggunaan adil dan bijak terhadap alokasi belanja modal dapat memperbaiki infrastruktur dasar di kota/kabupaten, meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan dampak positif

bagi kehidupan masyarakat setempat. Namun demikian, pengaruh pendapat asli daerah terhadap alokasi belanja modal di kota/kabupaten tidak signifikan secara statistik (Dalil et al., 2020). Artinya, terdapat faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi alokasi belanja modal di Provinsi Papua, seperti kebijakan nasional, tingkat pembangunan ekonomi daerah, dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Faktor-faktor ini dapat membatasi pengaruh positif yang seharusnya ditimbulkan oleh pendapat asli daerah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pendapat asli daerah juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, potensi pengaruh positif pendapat asli daerah terhadap alokasi belanja modal di kota/kabupaten dapat menjadi lebih signifikan. Dalam konteks Provinsi Papua, alokasi belanja modal di kota/kabupaten harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pemerintah provinsi. Sinergi dan kerjasama antara semua pihak ini diperlukan untuk mencapai alokasi belanja modal yang optimal, sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah setempat.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di wilayah Papua Tahun 2013 – Tahun 2022

Hasil analisis menggunakan uji t menjelaskan bahwa nilai uji t variabel dana alokasi umum sebesar 0,107 ( $< 1,987$  tabel) dan nilai signifikan 0,079 ( $> 0,05$ ) sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel dana alokasi umum memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/ kabupaten di Papua tahun 2013 hingga tahun 2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah, (2006), Ndadari & PriyoHari, (2008), dan Inayati, (2012).

Dalam konteks Provinsi Papua, dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten. Proses alokasi DAU merupakan mekanisme redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pembangunan dan pemerataan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah (Alpi, 2021). Pengaruh positif DAU terhadap alokasi belanja modal di kota/kabupaten di Provinsi Papua dapat dilihat dari peningkatan dana yang diterima oleh pemerintah daerah. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Alokasi belanja modal yang lebih besar tentunya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini dapat berdampak positif bagi kota/kabupaten dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja (Dhita dan Didit, 2017). Namun demikian, pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, DAU yang diterima oleh kota/kabupaten umumnya terbatas sehingga tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan yang ada. Ketidacukupan dana tersebut dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang lebih besar dan kompleks. Selain itu, alokasi belanja modal juga dipengaruhi oleh prioritas pemerintah daerah dalam merencanakan pengeluaran. Terdapat berbagai sektor yang membutuhkan dana belanja modal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik (Putra et al., 2021).

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari setiap sektor tersebut sehingga alokasi belanja modal dapat terbagi secara merata. Selain itu, efektivitas penggunaan dana alokasi umum juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi alokasi belanja modal. Meskipun dana telah dialokasikan, namun jika tidak digunakan dengan efektif dan efisien oleh pemerintah daerah, maka manfaatnya akan terbatas. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut serta pengelolaan keuangan yang teratur dan transparan sangat penting guna memaksimalkan alokasi belanja modal (Baharuddin, 2022). Dalam rangka meningkatkan pengaruh positif DAU terhadap alokasi belanja modal di kota/kabupaten di Provinsi Papua, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus dapat menyusun rencana pembangunan yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah secara holistik. Pemberian bantuan teknis dan pendampingan dari pemerintah pusat juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

## 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di wilayah Papua Tahun 2013 – Tahun 2022

Hasil analisis menggunakan uji t menjelaskan bahwa nilai uji t variabel dana alokasi khusus sebesar 0,436 ( $< 1,987$  tabel) dan nilai signifikan 0,000 ( $< 0,05$ ) sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja

modal kota/ kabupaten di Papua tahun 2013 hingga tahun 2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumadi, (2013), Khusaini, (2014), dan Nurdini et al., (2015).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan di daerah. DAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua (Putra et al., 2021). DAK memberikan sumber pendanaan tambahan yang signifikan bagi kota/kabupaten di Provinsi Papua. Dalam alokasi belanja modal, dana yang diperoleh dari DAK dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan. Dengan adanya tambahan dana dari DAK, kota/kabupaten di Provinsi Papua dapat meningkatkan tingkat investasi dan pembangunan di wilayah tersebut (Dhita dan Purnomo, 2017).

Selain itu, DAK juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten di Provinsi Papua. Melalui alokasi belanja modal yang menggunakan dana DAK, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan sektor ekonomi lokal. Contohnya, dengan membangun infrastruktur jalan, aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil di Provinsi Papua menjadi lebih baik. Hal ini dapat membuka peluang bagi sektor pariwisata dan perdagangan untuk berkembang, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Jayanti, 2020). DAK juga berperan penting dalam peningkatan pelayanan publik di kota/kabupaten di Provinsi Papua. Melalui alokasi belanja modal, pemerintah daerah dapat memperbaiki dan memperluas fasilitas publik, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Dengan adanya fasilitas publik yang memadai, masyarakat di kota/kabupaten di Provinsi Papua dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya.

DAK juga dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan sosial di kota/kabupaten di Provinsi Papua. Melalui alokasi belanja modal yang menggunakan dana DAK, pemerintah daerah dapat membangun program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dalil et al., 2020). Contohnya, dengan membangun rumah susun atau perumahan sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam memiliki tempat tinggal layak.

#### 4. Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di wilayah Papua Tahun 2013 – Tahun 2022

Hasil analisis menggunakan uji t menjelaskan bahwa nilai uji t variabel dana otonomi khusus sebesar 0,345 ( $< 1,987$  ttabel) dan nilai signifikan 0,000 ( $< 0,05$ ) sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel dana otonomi khusus memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/ kabupaten di Papua tahun 2013 hingga tahun 2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalil et al., (2020), Iqbal et al., (2021), dan Putra et al., (2021)

Dana otonomi khusus (Otsus) merupakan dana yang dialokasikan khusus untuk wilayah Papua sebagai bagian dari implementasi Otsus Papua. Dana ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Salah satu pengaruh positif dan signifikan dari dana Otsus terhadap alokasi belanja modal di kota/kabupaten di Provinsi Papua adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Hartati & Taufik, 2020). Pertama-tama, dana Otsus dapat meningkatkan alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua karena jumlah dana Otsus yang diterima oleh daerah tersebut cukup besar. Dana Otsus yang diterima oleh setiap kabupaten dan kota dihitung berdasarkan rumus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah dana yang diterima biasanya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya (Ginting, 2019).

Dengan adanya dana Otsus ini, kota/kabupaten di Provinsi Papua dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan lebih baik. Selain itu, pengaruh positif lainnya adalah dana Otsus juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota/kabupaten di Provinsi Papua. Dana Otsus dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya. Dengan adanya dana Otsus ini, kota/kabupaten di Provinsi Papua dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Subadriyah, 2018). Misalnya, dengan adanya dana Otsus, sebuah kota di Provinsi Papua dapat membangun rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas medis yang lengkap sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, dana Otsus juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di kota/kabupaten di Provinsi Papua.

Dana Otsus yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak (Armadani & Maryono, 2017).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan menggunakan dana Otsus ini untuk mempekerjakan masyarakat setempat sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap angka pengangguran di daerah tersebut. Dengan adanya lapangan kerja baru, masyarakat dapat mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan yang lebih baik (Ekawarna, 2017). Namun, di sisi lain, penggunaan dana Otsus ini juga perlu diawasi dengan ketat agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Pemerintah daerah di Provinsi Papua perlu mengimplementasikan sistem pengawasan yang baik dan transparan dalam menggunakan dana Otsus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Terjadi fenomena flypaper effect berdasarkan analisis yang dilakukan dimana nilai koefisien PAD lebih kecil dibandingkan nilai koefisien variabel DAU, DAK dan Otonomis Khusus (Otsus) dalam menentukan/mempengaruhi nilai Belanja Modal. Artinya terjadi flypaper effect pada pemerintah kabupaten/kota di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Papua masih bergantung kepada pemerintah pusat. Terdapat pengaruh positif tidak signifikan pendapat asli daerah terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua terlihat dalam memberikan otonomi daerah dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal. Namun, faktor-faktor lain seperti kebijakan nasional dan efisiensi pengelolaan anggaran juga memiliki peranan penting dalam menentukan alokasi belanja modal yang optimal. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik dan kerjasama antar-stakeholder merupakan faktor kunci untuk mencapai pengaruh pendapat asli daerah yang lebih signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar di kota/kabupaten Provinsi Papua. Terdapat pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua bersifat positif namun tidak signifikan, tetap terdapat peluang untuk meningkatkan pengaruh tersebut dengan pemenuhan sumber daya yang cukup, perencanaan yang baik, dan pengelolaan keuangan yang efektif. DAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua. DAK memberikan pendanaan tambahan yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperbaiki pembangunan sosial. Dengan adanya DAK, pembangunan di Provinsi Papua dapat berjalan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota/kabupaten tersebut. Dana Otsus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kota/kabupaten di Provinsi Papua. Dana ini dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, penggunaan dana Otsus ini juga perlu diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyelewengan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

### **2. Saran**

Kepada Pemerintah Pusat Dana transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah. Di sisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional. Faktor lainnya adalah munculnya persaingan pengeluaran antar daerah. Kecenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal. Kepada Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan agar pemerintah daerah terus berupaya untuk selalu mengoptimalkan pengelolaan atas alokasi dana transfer dari pusat (misalnya: DAU, DAK, dan sebagainya) untuk tujuan pelayanan kepada masyarakat dan program-program pembangunan di daerah

yang dapat meningkatkan perekonomian di daerah. Peningkatan perekonomian di daerah selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satu tujuan pemberian alokasi dana transfer dari pusat kepada daerah adalah agar daerah dapat meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan potensi sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepada Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian dimasa yang mendatang untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif berkaitan dengan “flypaper effect” pada keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Rizqullah, Meldona. 2023. Analisis Flypaper Effect dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi Belanja Daerah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832–842 ISSN 2685-869X.
- Christine Tiolina Siahaan. 2020. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Dengan Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2014-2018). Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Dhita Agustina dan Didit Purnomo. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Periode 2011-2015). *Ekonomi Pembangunan*.
- Eka Daddy Kurnia. 2013. Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Fifi Armadani, Maryono. 2017. Analisis flypaper effect pada belanja daerah pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Volume 4, Number 7, 2022 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205.
- Gujarati, D. N dan Porter, D. C. 2009. *Basic Econometrics*. Fifth Edition. McGraw-Hill. New York. Terjemahan Mangunsong, R. C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5-Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422>.
- Jumadi, dkk. 2013. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 13 (1): 01-07.
- Maimunah. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang: 1- 27.
- Ndadari, Laras Wulandan Adi, PriyoHari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya*.
- Nur Isna Inayati. 2012. Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* p-ISSN 2548 –298X.
- Paramartha, Budiasih. 2016. Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.2. Mei (2016): 1536- 1564.
- Putra, I., Abbas, T., & Ratna, R. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3583>.
- Rini Nurdini, Adi Wiratno, Yusriati Nur Farida. 2015. Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2, No. 1, Maret 2015.
- Robert M. Wst. Marbun, Ida Ayu Purbariani, Charley M. Bisai. 2016. Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 3 No. 1 April 2016.

- Santi Elisabet Situmorang. 2023. Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja dan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Studi Pembangunan* Vol 2 No 1, 2023: 28-36.
- Sartono, S., & Zulkifli, Z. (2023). Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah: Literatur Review. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 56. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3177>.
- Shita Unjaswati Ekawarna. 2017. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017 ISSN: 2338-4603.
- Shochrul R Ajija. Dyah W Sari. Rahmat H Setianto. Martha R Primanti. 2019. Cara Cerdas Menguasai E-Views. Salemba Empat.
- Situmorang, S. E. 2023. Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja dan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Studi Pembangunan*, 2(1), 28–36.
- Subadriyah, Solikhul Hidayat. 2018. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Optimum*, Volume 8, Nomor 2 September 2018.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009.
- Winda Hartati, Taufeni Taufik. 2020. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa di Kabupaten Siak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini* Vol. 1, No. 2, Juli 2020, pp. 327-347.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. 2022. Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>.